

KETIDAKADILAN SUBSTANSIAL DAN KEKERASAN SIMBOLIK DALAM PROBLEM MARGINALISASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SURAKARTA

Jurnal Analisa Sosiologi
April 2024, 13 (2): 395-427

Theofilus Apolinaris Suryadinata*

Abstract

This research leads to the marginalization of children with special needs in Surakarta, Central Java. The self-development of a human being determined both genetically and in the social environment has implications for different abilities both physical and mental. In society, there are often social groups of children with special needs who are not only different but also lacking in certain aspects. This is also the case in Solo. This research doesn't just show the causes of marginalization, but also analyze it using the perspective of Rawlsian theory of justice and symbolic violence of Pierre Bourdieu. The method used is qualitative participation action research and collecting secondary data. The results showed that marginalization of children with special needs still occurs in educational environments, community environments, especially neighborhoods, even though there have been efforts to overcome it slowly. Substantial injustice mainly occurs in the provision of public facilities for children with special needs for inclusive education and environment. In addition, there are still found symbolic violence especially in families that is rarely realized and difficult to detect in the problem of marginalization of children with special needs.

Keywords: *Child With Special Needs, Marginalization, Substantial Injustice, Symbolic Violence, Education, Family*

Abstrak

Penelitian ini berbicara tentang marginalisasi terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) di Surakarta, Jawa Tengah. Perkembangan diri seorang manusia yang ditentukan baik secara genetik maupun lingkungan sosial berimplikasi pada kemampuan yang berbeda baik fisik maupun mental. Di masyarakat, kerap kali dijumpai kelompok sosial anak berkebutuhan khusus yang tidak hanya berbeda, tetapi juga berkekurangan dalam aspek tertentu. Hal ini juga terjadi di Surakarta. Penelitian ini tidak hanya mengemukakan sebab-sebab marginalisasi, tetapi juga menganalisisnya dengan menggunakan perspektif teori keadilan Rawlsian dan kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu. Metode yang dipakai adalah *participation action research* secara kualitatif dan mengumpulkan data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marginalisasi anak berkebutuhan khusus tetap terjadi di lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, terutama ketetanggaan, meskipun sudah ada upaya untuk mengatasinya secara perlahan. Ketidakadilan substansial terutama terjadi dalam kurangnya penyediaan fasilitas publik bagi anak berkebutuhan khusus untuk pendidikan dan lingkungan yang inklusif. Selain itu masih ditemukan kekerasan simbolik terutama dalam keluarga-

keluarga yang jarang disadari dan sulit dideteksi dalam problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Marginalisasi, Ketidakadilan Substansial, Kekerasan Simbolik

PENDAHULUAN

Sejak dilahirkan dan dalam perkembangannya, setiap manusia sangat bergantung pada pewarisan genetik maupun dukungan lingkungan sosial. Pada kenyataannya, tidak setiap orang merasakan keberuntungan karena ada juga yang mengalami kekurangan tertentu baik secara fisik maupun mental. Problem tersebut menimpa kelompok Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Surakarta, Jawa Tengah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di beberapa kecamatan; Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, kelompok Anak Berkebutuhan Khusus (*Child with Special needs*) rentan mengalami marginalisasi. Gejala marginalisasi terhadap anak berkebutuhan khusus misalnya penolakan, perundungan, pengucilan bahkan hingga kekerasan fisik. Tentu saja hal ini sangat melukai perasaan mereka dan orang tuanya, dan kemanusiaan. Hal tersebut menandakan bahwa lingkungan sosial tidak cukup inklusif bagi mereka sehingga mereka cenderung untuk sulit berkomunikasi dengan orang-orang lain. Dalam perspektif inklusi, suatu masyarakat disebut inklusif bila masyarakat tersebut berhasil menghilangkan segenap bentuk ketidakadilan yang mengarah kepada diskriminasi, marginalisasi dan sejenisnya. Dengan demikian, pembangunan manusia yang berkualitas dalam konteks pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Kajian terhadap masalah marginalisasi anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi telah dilakukan oleh beberapa penulis. Penelitian *The Marginalization of Children with Disabilities in Indonesia: A Case Study*. International Journal of Inclusive Education, 26(1), 33-46 oleh Prasetyo, A. (2022), menunjukkan adanya marginalisasi terhadap anak berkebutuhan khusus di kota Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus seringkali mengalami diskriminasi dan kekerasan berupa penolakan, pengucilan, dan kekerasan fisik atau verbal, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Marginalisasi ini dapat berdampak negatif terhadap perkembangan dan kualitas hidup anak berkebutuhan khusus.

Penelitian Marginalisasi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 19(2), 111-125 oleh Rohmah, I. (2022), membahas tentang marginalisasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi masih sering mengalami diskriminasi. Diskriminasi yang dialami anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat berupa penolakan dari teman sebaya, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Penelitian Marginalisasi Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 10(1), 1-11 oleh Indriyani, R. (2021), membahas tentang marginalisasi sosial terhadap anak berkebutuhan khusus di kota Malang, Jawa Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus di kota Malang menghadapi diskriminasi, kekerasan dan marginalisasi akibat kurangnya dukungan pemerintah dan masyarakat. Diskriminasi yang dihadapi anak berkebutuhan khusus di kota Malang dapat berupa penolakan sosial, diskriminasi dalam pelayanan publik, dan kekerasan fisik. Kekerasan yang dialami anak berkebutuhan khusus di kota Malang dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Kajian-kajian yang dilakukan sebelumnya menemukan hal-hal yang relatif sama yaitu kelompok anak berkebutuhan khusus sering mendapatkan perlakuan diskriminasi, pengucilan, kekerasan baik fisik, verbal, seksual, maupun emosional oleh teman sebaya, guru, dan masyarakat umum. Mereka juga dibatasi dalam hal aksesnya terhadap pelayanan publik yang seharusnya disediakan pemerintah.

Berbeda dengan kajian di atas, terhadap problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Surakarta, penulis berpandangan bahwa problem tersebut dapat dijelaskan sebagai bentuk ketidakadilan substansial dan kekerasan simbolik dalam masyarakat. Ketidakadilan substansial dan kekerasan simbolik merupakan dua perspektif yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Perspektif ketidakadilan substansial diambil penulis dari Teori Keadilan John Rawls. Sedangkan perspektif kekerasan simbolik diambil penulis dari Sosiolog kenamaan Prancis, Pierre Bourdieu. Dua perspektif ini dapat membantu penulis untuk merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: a. Bagaimana gambaran problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Surakarta? Dan b. Bagaimana ketidakadilan

substansial dan kekerasan simbolik terjadi dalam problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Solo? Tujuan tulisan ini adalah menjelaskan bagaimana ketidakadilan substansial dan kekerasan simbolik terhadap anak berkebutuhan khusus dapat menjelaskan problem marginalisasi terhadap mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Surakarta, Jawa Tengah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif mendeskripsikan keadaan, sifat atau hakikat nilai atau gejala tertentu. Metode kualitatif bertujuan untuk menggali kedalaman data dan mengandung makna. Makna merupakan data yang sebenarnya, suatu nilai di balik yang tampak, yang hanya mungkin terungkap melalui analisis berdasarkan perspektif yang tepat. Jenis penelitian ini adalah *participation action research*. Data-data yang diperoleh merupakan rekaman kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti di Yayasan Al-Firdaus, sebuah Yayasan Pendidikan yang memasukkan prinsip inklusif dalam proses pendidikan. Data-data yang didapatkan merupakan hasil keterlibatan peneliti ketika menjadi konsultan maupun narasumber dalam kegiatan-kegiatan untuk melayani kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan orang tuanya. Sehingga data yang dihasilkan merupakan data primer. *Metode participation action research* ini sangat membantu peneliti karena lewat konsultasi yang dilakukan oleh dua (2) keluarga ABK, peneliti mendapat cerita keseluruhan dan mendalam pada setiap kasus. Terutama ketika menggunakan lensa teori kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu, cerita keseluruhan dan mendalam dari setiap kasus saat konsultasi memungkinkan peneliti memetakan habitus dan konstelasi modal dalam ranah keluarga yang menghasilkan kekerasan simbolik. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan data hasil wawancara terhadap sembilan (9) informan sebagai orang tua dan guru dari ABK yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa terkait problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus di tiga kecamatan yaitu Jebres, Laweyan dan pasar Kliwon. Data-data yang dihasilkan dari wawancara merupakan data sekunder. Triangulasi data dilakukan berbasis sumber, yaitu data yang dihasilkan oleh peneliti dibandingkan dengan data yang dihasilkan

oleh para mahasiswa. Semua data tersebut dianalisis berdasarkan perspektif teori keadilan dari John Rawls dan Teori Kekerasan Simbolik dari Pierre Bourdieu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran tentang Marginalisasi Anak Berkebutuhan khusus di Solo.

Marginalisasi merupakan suatu kondisi yang mencegah individu maupun kelompok untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, dan politik yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas (Alakhunova, et al, 2015: 8). Definisi lain menyatakan marginalisasi sebagai wujud keterpinggiran yang mana orang-orang terpinggirkan tersebut tidak memiliki kontrol atas hidupnya secara keseluruhan dan tidak memiliki akses terhadap fasilitas umum (Rakhmayanti dan Wiyatmi, 2019:14). Dengan kata lain, marginalisasi merupakan suatu proses sosial yang mengkondisikan baik individu maupun kelompok tertentu sehingga kurang atau bahkan tidak mampu untuk terlibat dalam kehidupan sosial yang menyeluruh.

Terdapat empat pendekatan untuk mengidentifikasi kaum yang termarginalisasi (Chand, et al, 2017: 18), antara lain: (1) segi *geometrical*, orang-orang yang termarginalkan berdasarkan wilayah/letak geografis mereka, baik dari area kecil maupun besar; (2) segi *ecological*, orang-orang yang termarginalkan karena lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya; (3) segi *economic*, marginalisasi yang berkaitan dengan potensi produktif, infrastruktur, aksesibilitas, dan interaksi tanpa kesenjangan ekonomi; (4) segi *social*, marginalisasi berfokus pada kaum minoritas (kaum marginal) berdasarkan etnik, bahasa, agama, dan sebagainya).

Marginalisasi dapat dicirikan (Haslinda, 2009) sebagai berikut: a) menderita diskriminasi dan subordinasi, b) memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dan tidak disetujui oleh kelompok dominan sehingga memunculkan stigma negatif, c) masyarakat marginal berbagi rasa identitas kolektif dan

beban bersama, d) Masyarakat marginal berbagi aturan sosial, siapa yang termasuk dan siapa yang tidak, dan e) memiliki akses yang rendah bahkan tidak memiliki akses terhadap berbagai fasilitas publik

Marginalisasi terhadap anak berkebutuhan khusus di Solo lebih berkaitan dengan lingkungan sosialnya yang kemudian menghambat mereka untuk berinteraksi sosial secara bermakna dan produktif. Karakteristik mereka yang agak berbeda dari anak-anak yang lainnya menciptakan pandangan tertentu dari masyarakat yang berimplikasi pada terganggunya interaksi sosial mereka yang wajar, akses mereka pada fasilitas publik kehidupan yang selayaknya dan bermakna.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan sebutan lain bagi Anak Luar Biasa (ALB). Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mempunyai karakteristik khusus serta kemampuan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya (Dermawan 2013:887). Dalam proses tumbuh kembangnya, anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan fisik, mental, intelektual, sosial dan emosional yang berbeda dari anak-anak lainnya yang seumuran (Zara dan Jatningsih 2018:714). Adapun klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus meliputi; anak dengan gangguan penglihatan (tuna netra), anak dengan gangguan pendengaran (tuna rungu), anak dengan kemampuan intelektual di bawah kemampuan rata-rata (tuna grahita), anak dengan keterbatasan fisik (tuna daksa), anak dengan hambatan emosi dan tingkah laku yang buruk (tuna laras), anak dengan kemampuan inteligensi di atas rata-rata (*gifted*), anak yang mengalami gangguan dalam belajar (lamban belajar), anak yang autis dan anak yang hiper-aktif (*attention deficit hyperactive disorder/ADHD*) (Layyinah, et al, 2023: 3) .

Marginalisasi Anak Berkebutuhan Khusus di Surakarta dapat dilihat di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Jebres misalnya, marginalisasi terjadi di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Kecamatan Jebres merupakan kecamatan yang memiliki banyak sekolah dari PAUD sampai Perguruan Tinggi. Ada 195 sekolah dan 12 perguruan tinggi di kecamatan ini yang menjadikannya sebagai sentra pendidikan di Surakarta (Dapodik Kemdedikbud, 2023). Di kecamatan ini terdapat juga unit pelaksana teknis

layanan disabilitas dan pendidikan inklusif. Meskipun hadirnya lembaga pendidikan yang banyak dan unit teknis khusus layanan disabilitas terdapat di kecamatan ini, hal itu tidak menyangkal kenyataan masih terjadinya marginalisasi terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan.

Pendidikan merupakan upaya pengembangan bakat dan potensi setiap manusia untuk kehidupann yang lebih baik, dan bermartabat. Banyak pihak yang terlibat dalam pendidikan misalnya orang tua, guru, siswa, pemerintah, pihak swasta dan lainnya. Secara sederhana pendidikan dapat dibagi menjadi dua berdasarkan formalitasnya (diakui secara legal formal oleh pemerintah) yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang mana tingkatan tersebut terikat dalam sistem sekolah. Sedangkan menurut Axin (dalam Syaadah et al, 2022: 127), pendidikan non-formal adalah jenis pendidikan yang tidak mewajibkan adanya jenjang yang terstruktur dan dilakukan di luar sistem sekolah.

Secara substansial, pendidikan berarti berbagai macam cara di dalamnya pengetahuan khusus baik informasi faktual dan keterampilan maupun nilai-nilai dan norma budaya ditransferkan kepada setiap anggota masyarakat. Sepanjang hidup kita belajar banyak hal dari keluarga, kelompok bermain, pemimpin sosial dan politik, tokoh agama, bahkan media massa (Raho, 2008:151). Namun, sebagian proses belajar di masyarakat di tempuh di sekolah sebagai lembaga formal. Sekolah merupakan tempat atau agen sosialisasi kita yang paling penting. Pendidikan formal merupakan bagian penting dari masyarakat modern karena melalui pewarisan pengetahuan dan ilmu pengetahuan muncul generasi yang terdidik dengan baik (*well educated*) dan masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*). Oleh karena itu, pendidikan merupakan institusi sosial yang vital bagi masyarakat dan karenanya setiap orang sudah seharusnya mendapat akses yang adil dan merata terhadap pendidikan yang bermutu. Untuk itu, layanan pendidikan haruslah inklusif, artinya terbuka dan adil kepada setiap individu dan kelompok sosial di masyarakat.

Dalam kenyataannya, pendidikan yang inklusif itu belum sepenuhnya

maksimal di kecamatan Jebres. Salah satu orang tua dari Anak berkebutuhan khusus, dengan narasumber P mengalami bahwa anaknya diperlakukan secara diskriminatif, terutama oleh teman-temannya. Anaknya yang masih di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sering mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Akibatnya anaknya lebih memilih untuk menyendiri dan tidak mau bergaul di lingkungan sosial. Anaknya terkucil dari lingkungan sosial. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber P:

“anak-anak di komplek rumah pada gamau diajak main, anak saya jadinya lebih suka main sendiri sih”.

Berdasarkan kesaksian dari narasumber E yang juga merupakan orang tua dari ABK kurang lebih memiliki pengalaman yang sama. Anak dari narasumber E sering mendapat perundungan dari teman-teman sekelasnya. Dampak lebih lanjut adalah anaknya mengalami gangguan perilaku *Opositional Defiant Disorder* (ODD) dengan gejala seperti *mood* yang tidak stabil, kecemasan, ketidakmampuan mengontrol emosi seperti marah-marah yang tidak terkendali (Nock, et all, 2007). Karena terkucil dari lingkungan pergaulan teman-temannya di sekolah, maka anak tersebut dipindahkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Anak tersebut tidak melawan ketika mengalami perundungan di sekolah umum. Bagaimanapun, hal itu terjadi karena daya tawarnya tidak kuat di hadapan teman-temannya. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber E:

“Untuk dampaknya karena anak saya pas itu juga masih kecil, jadi mungkin belum seberapa ngerti ya. Tapi kayaknya karena pernah dikucilin di sekolah itu dia jadi menutup diri dan lebih mengeluarkan emosinya pada orang lain.”

Melalui perundungan, anak dari narasumber E juga sering mendapatkan laporan dari guru terkait keadaan tersebut. Akibatnya, anak dari narasumber E harus dipindahkan ke SLB, karena ketika berada di sekolah umum mereka dikucilkan. Anak dari narasumber E juga tidak berani untuk melakukan perlawanan, karena ABK adalah kelompok minoritas yang tidak memiliki daya tawar. Berikut pernyataan dari narasumber E:

“Kalo di sekolah pernah sih (dikucilkan) dulu pas di sekolah umum kan [...] kalau di SLB ini ga pernah. Dulu pernah TK di sekolah

umum, tapi ternyata disana dibully dan anak saya diem aja ga ngelawan.”

Marginalisasi anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah terjadi juga karena subordinasi. Subordinasi ditandai oleh dominasi dari kelompok dominan terhadap anak tersebut. Dominasi tercipta karena anak-anak kebanyakan melihat perbedaan yang cukup kontras antara mereka dengan anak berkebutuhan khusus dari segi *gesture* dan gerak tubuh yang tidak proporsional. Perbedaan tersebut memunculkan stigma tertentu di antara mereka yaitu anak yang normal dan anak yang tidak normal. Jadi, perbedaan yang dikotomis; normal dan tidak normal berakibat pada munculnya perilaku diskriminasi dan subordinasi yang destruktif bagi anak berkebutuhan khusus.

Marginalisasi tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan sosial yang lebih luas. Meskipun demikian, tetap ada lingkungan sosial yang lebih bisa memahami anak berkebutuhan khusus sehingga tidak menaruh stigma negatif ataupun berperilaku destruktif terhadap anak berkebutuhan khusus. Salah satu orang tua dari anak berkebutuhan khusus, dengan narasumber H berpandangan bahwa lingkungan sosial mereka tidak membatasi hak, akses dan fasilitas yang dijangkau oleh anak berkebutuhan khusus. Baik dari pihak keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat turut merangkul dan mendukung anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh kembangnya. Mereka tidak membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus dari anak-anak yang lain. Berikut kutipan dari narasumber H:

“Keluarga saya alhamdulillah menerima mbak, bersyukur juga bahkan keluarga besar itu lebih menyayangi dan mengayomi Dimas. Di lingkungan tempat tinggal saya pun sejauh ini aman mbak. Dimas diperlakukan selayaknya anak-anak biasa. Toh orang-orang sekitar saya juga sudah tau kalo Dimas itu anak spesial, jadinya lingkungan sekitar juga lebih merangkul Dimas dan dijaga kalo pas main gitu. Untuk mendapatkan fasilitas gitu-gitu tidak ada kesulitan malah justru mudah dan disamakan kaya anak pada umumnya, jadi gak ada kayak perbedaan kayak gitu alhamdulillah.”

Ini tentu saja berbeda dari orang tua yang lain yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Narasumber E mengemukakan bahwa lingkungan sekitar tempat tinggalnya belum sadar dan paham dengan kondisi anaknya yang

berkebutuhan khusus. Tatapan mata yang sinis terhadap anak berkebutuhan khusus mencerminkan stigma yang negatif terhadap mereka. Sehingga orang tua memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya, dan memilih untuk menjaganya di rumah saja. Keterbatasan fisik dan mental dari anak berkebutuhan khusus memang menjadi penghambat bagi mereka. Meski demikian, hambatan itu menjadi semakin berat justru ketika mereka tidak mendapatkan dukungan semestinya dari lingkungan sosial. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber E:

“Mungkin kalau di masyarakat luas, seperti kalo saya ajak ke mall kan mungkin banyak orang yang belum tau jadi mereka ngeliatin terus dengan memandang aneh atau sinis gitu. Awalnya sih jengkel tapi saya tegur dan jelaskan saja. Kalo di lingkungan sekitar rumah, paling lebih ke tetangga-tetangga memandang aneh aja karna merekakan belum pernah atau mungkin belum terbiasa melihat anak saya yang berbeda gitu.”

Marginalisasi terhadap anak berkebutuhan khusus juga terjadi di kecamatan Laweyan. Ada tiga faktor penyebab marginalisasi yaitu 1) faktor ekonomis dan geografis, 2) faktor kualifikasi pengajar, dan 3) faktor keterbatasan anak itu sendiri. Marginalisasi yang disebabkan oleh faktor ekonomis dan geografis terjadi pada seorang anak yang datang dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Anak tersebut terkategori sebagai anak yang mengidap *down-syndrome*. Setiap hari dia rutin keluar rumah dan duduk di pinggir jalan hingga meminta-minta dari warung ke warung. Masyarakat khususnya anak-anak yang sebaya yang melihat anak tersebut lantas mengolok-oloknya. Kurangnya penanganan dari keluarga karena faktor ekonomi membuat anak itu tidak bisa mengakses pendidikan yang layak, bahkan mendapatkan perundungan di masyarakat. Marginalisasi yang terjadi secara geografis biasanya terjadi di perkampungan. Mereka lebih sering mendapatkan perundungan dari masyarakat. Sedangkan di kawasan perumahan, perundungan terutama secara verbal minim terjadi. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber E:

“Ada juga beda kampung sih, karna saya di perumahan dan ada anak lain yang juga DS tapi dia ga sekolah. Entah dari orang tuanya kesulitan buat transportasi atau apa, jadi kalo pagi-pagi gitu anaknya

duduk di pinggir jalan atau jalan-jalan minta-minta dari warung satu ke satunya. Biasanya pas di warung itu dikasih makanan sama orang-orang. Jadi pas pulang dia bawa banyak makanan. Nah temennya di sana kan dia menyamakan, wajahnya K kok mirip, mungkin mikir aja tapi dia ga ngomong secara langsung (mencela) kaya "Awes ada R..," karena namanya R.

Berdasarkan informasi yang diungkapkan seorang narasumber L sebagai guru di SLB C Tunagrahita Kerten, Surakarta, faktor pendidikan menjadi pemicu bagi marginalisasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Ada banyak anak berkebutuhan khusus yang hidup di lingkungan tempat tinggalnya mengalami stigmatisasi negatif, diskriminasi, perundungan yang berujung pada isolasi diri dari lingkungan sosial. Anak berkebutuhan khusus tidak bisa bersekolah sehingga sosialisasi yang dilakukan terbatas pada lingkungan keluarga saja. Selain itu kesadaran masyarakat sekitar yang kurang memahami keadaan anak berkebutuhan khusus yang berakibat pada munculnya stigma-stigma buruk. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber L:

"Ada beberapa keluarga yang udah sadar, tapi ada 1 keluarga yang gak sadar. Dia dari umur udah SMA tapi gabisa baca, ngomong, berinteraksi. Di sekitar lingkungan saya banyak yang gosipin. Saya ngomong kalau dia di sekolahin SLB gapapa karena dia pasti ada peningkatan pasti dia bisa ngobrol, baca, menulis. Emang harus diberikan treatment lebih untuk abk, dimasukkan ke SD atau dimasukkan ke tempat les. Itu saya bilang ke masyarakat sekitar biar pada tau. Karena tetangga saya yang kurang sadar mengenai abk nya karena dari latar belakang yang kurang baik."

Faktor kualifikasi pengajar di sekolah berpengaruh pada marginalisasi anak berkebutuhan khusus. Di sekolah inklusi, yaitu sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus, terdapat masalah yang penting yaitu kualifikasi pengajar. Kegiatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus menuntut adanya penanganan khusus dari Guru Pendamping Khusus dengan sarana-sarana yang khusus pula. Seorang guru pendamping khusus perlu memiliki pemahaman tentang apa yang dibutuhkan oleh anak

berkebutuhan khusus dan bagaimana melakukan penanganan yang sesuai dalam mendukung aspek pembelajaran, keterampilan dan kemandirian (Berlinda dan Naryoso, 2018:6). Dalam praktiknya, ditemukan bahwa Guru Pendamping Khusus belum terlalu melek akan hal tersebut.

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh anak N yang dahulu sempat bersekolah di sekolah inklusi, anak N masih merasakan kesulitan selama kegiatan belajar mengajar di sekolah inklusi walaupun sudah didampingi oleh guru pembimbing khusus (GPK). Disamping tidak hanya mengalami kesulitan dalam hal proses pembelajaran, anak N juga mengalami masalah dengan teman kelasnya. Orang tua yaitu narasumber S menceritakan bahwa anak N dikucilkan temannya karena stigma buruk yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan terkesan mencari perhatian lebih kepada guru-guru dikarenakan ia duduk di bangku depan.

Hal yang sama dirasakan anak B yang mengalami perundungan secara verbal dengan diolok-olok dan dicap sebagai anak bodoh dikarenakan yang bersangkutan memiliki keterlambatan dalam menerima pembelajaran. Diungkapkan narasumber D selaku orang tua dari anak B, pada awalnya ia menyadari bahwa anak B membutuhkan penanganan yang ekstra dalam memahami pembelajaran, khususnya pada kegiatan membaca dan menulis. Ketika bersekolah di sekolah inklusi pada jenjang sekolah dasar, beberapa guru bahkan sempat menyampaikan keresahannya kepada orang tua anak B. Mereka harus menangani sang anak yang dianggap nakal dan sering mengganggu teman-teman lain ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber D:

“Jaman B di umum malah suka marah-marah ngamuk-ngamuk ya karena dibodoh-bodohin sama temannya, nggak bisa imbang sama teman-temannya jadinya ngamuk.

Guru-gurunya malah yang cerita ke saya. Ini anaknya nakal ketika didikte malah ganggu teman-teman yang lain dicoret-coret bukunya. Temannya ga boleh nulis karena dia sendiri nggak nulis, jadi kan malah ganggu orang lain. Memang katanya itu punya dunianya sendiri kata dokternya jadi disarankan sekolah di SLB.”

Faktor ketiga merupakan faktor karena keterbatasan anak itu sendiri. Kesulitan yang mereka hadapi sendiri menyebabkan anak cenderung untuk menarik diri dari lingkungan sosial dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada seseorang yang merasa dirinya tidak memiliki kelebihan seperti teman-teman lainnya atau perasaan inferior dan lain-lain. Dampak lanjutannya adalah munculnya perasaan tidak percaya diri, penakut dan cenderung untuk menarik diri secara sosial (Nida, 2018: 48-49). Faktor keterbatasan karena anak itu sendiri diakui oleh salah satu orang tua yang memiliki anak yang jarang bergaul dengan orang lain dan cenderung menutup dirinya dari lingkungan sosial. Anaknya seakan-akan tidak mau berbaur dengan orang lain dan itu memang bawaan anak tersebut sejak kecilnya. Orang tuanya berupaya menyekolahkan anaknya di SLB agar melatih dirinya bisa berbaur dengan orang lain. Hasilnya anak itu bisa berkembang sedikit demi sedikit, mau berbaur meskipun hanya dengan orang tertentu saja.

Selain di dua kecamatan yaitu Laweyan dan Jebres, marginalisasi anak berkebutuhan khusus terjadi juga di kecamatan Pasar Kliwon. Jumlah anak berkebutuhan khusus di kecamatan ini sebesar 284 jiwa. Untuk itu pemerintah mendirikan satu sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB) Harmony. Marginalisasi di lingkungan pendidikan terutama Sekolah Luar Biasa relatif kurang karena sekolah sangat ketat peraturannya, misalnya melarang siswanya untuk membully siswa yang lain. Selain itu, staf tenaga pendidik juga benar-benar sesuai kompetensi untuk melayani anak berkebutuhan khusus.

Meski demikian cerita awal pendirian sekolah ini cukup menuai protes dari masyarakat setempat. Faktor kurangnya sosialisasi membuat penerimaan masyarakat terhadap kehadiran sekolah ini di masa-masa awalnya termasuk rendah. Masyarakat kerap menganggap anak-anak berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah itu merupakan anak nakal. Mereka sering menonton aktivitas di sekolah tersebut dan tingkah laku anak-anak berkebutuhan khusus itu sehingga cukup mengganggu para anak berkebutuhan khusus tersebut. Hal ini karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang problem anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk akses pendidikan yang layak bagi mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menerima lembaga sekolah tersebut dan lebih

memahami kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus itu.

Marginalisasi yang cukup parah sebetulnya terjadi di lingkungan ketetangaan di masyarakat. Tetangga sekitar yang tidak memahami kondisi anak berkebutuhan khusus yang acapkali tantrum misalnya memberikan stigma negatif kepada mereka. Masyarakat sering menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus mengganggu lingkungannya dan tidak bisa bersatu dengan lingkungan sosialnya. Mereka bahkan memanggil namanya dengan sebutan negatif, atau menolak untuk menyentuhnya. Sikap dan tindakan seperti ini tentu merupakan bentuk kekerasan yang sangat melukai anak berkebutuhan khusus. Selain itu, di dalam keluarga, anak berkebutuhan khusus diperlakukan berbeda dari anak yang lainnya. Mereka juga dianggap tidak lebih pintar dari anak yang lain dalam keluarga. Akibatnya mereka merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Mereka juga dikucilkan dari pergaulan dan bahkan dianggap lebih baik dimasukkan di sekolah luar biasa.

Dampak lebih jauhnya adalah orang tua yang ingin memasukkan anaknya di sekolah umum agak kesulitan. Hal ini karena di sekolah umum mereka biasanya sulit mendapatkan penanganan yang sesuai dengan gurunya. Kebanyakan guru di sekolah umum adalah guru biasa, dalam arti bukan berlatar belakang pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Orang tuapun akhirnya harus menemani anaknya saat di sekolah, dan bagi orang tua itu sangat melelahkan. Terhadap kondisi tersebut, masih saja ada kelompok masyarakat yang meminta anaknya dibawa ke orang pintar (dukun). Menurut mereka, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang kerasukan hantu. Stereotip yang sangat buruk ini sangat berdampak fatal karena si anak bisa saja salah dan terlambat mendapatkan pengobatan.

Dalam lingkungan rumah anak berkebutuhan khusus masih terdapat marginalisasi yang dialami oleh ABK maupun orang tua ABK. Marginalisasi anak berkebutuhan khusus di lingkungan rumah mereka menjadi tantangan serius yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan mereka. Salah satu bentuk marginalisasi yang umum terjadi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran lingkungan rumah terhadap kebutuhan khusus mereka. Pemahaman yang minim terhadap kondisi kesehatan atau perkembangan anak dapat mengakibatkan perlakuan tidak

sesuai dan kurangnya dukungan yang diperlukan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu J, selaku orang tua ABK:

“...waktu pagi hari jam 5 itu kan bangunin tetangga itu kan mengganggu tetangga tapi saya tidak kurang-kurangnya minta maaf ke tetangga baik ketika acara saat PKK atau yang lain. Itu bahkan tetangga saya yang tidak terima itu ada yang sampai kirim surat yang tidak bisa saya ceritakan. Ada yang bilang orang tua ga bisa didik. Ada yang bilang mengganggu orang lain itu masuk neraka Itu banyak tetangga yang seperti itu...”

Keberadaan stigma sosial juga dapat menciptakan lingkungan yang memarginalkan bagi anak berkebutuhan khusus di rumah. Anak-anak berkebutuhan khusus seringkali menghadapi tantangan yang lebih berat dalam mengintegrasikan diri di lingkungan masyarakat sekitar rumah. Meskipun memiliki keunikan dan potensi yang berbeda, mereka terkadang mengalami marginalisasi karena kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat. Para tetangga dan teman sebaya mungkin tidak sepenuhnya memahami kebutuhan dan keistimewaan anak-anak ini, sehingga mereka bisa merasa terpinggirkan secara sosial.

Narasumber PS sebagai salah satu orangtua ABK yang diwawacarai menyebutkan

“...kalau di lingkungan sekitar dulu sering dibully. Dulu pernah to mbak bukane sombong saya kan rutin setiap bulan ngasih sumbangan ke masjid, itu pas sholat kepala Taro dipukul dari belakang pas sujud terus dan bareng-bareng sama hampir 5 anak. Terus pernah waktu kecil main pulang-pulang dari kepala sampe kaki berlumuran lumpur. Terus sebadan biru semua dan pernah hilang.”

Kurangnya sosialisasi tentang pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus di masyarakat menjadi faktor munculnya marginalisasi bagi anak berkebutuhan khusus. Hal itu terbukti di Pasar Kliwon ketika masyarakat cenderung menolak kehadiran sekolah luar biasa pada masa-masa awalnya dan perlakuan mereka di lingkungan rumah dan ketetanggaan terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Tentu saja,

pemerintah dan pihak sekolah luar biasa juga berbagai pihak lain mesti mengencangkan sosialisasi terkait pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus. Bagaimanapun, anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain baik sebagai sesama manusia maupun sesama warga negara.

Pembahasan

Ketidakadilan Substansial dalam problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus

Dalam konteks pembangunan menuju masyarakat yang inklusif, problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus dapat dielaborasi melalui dua lensa teoretis yang penting yaitu teori keadilan dan teori kekerasan simbolik. Dua lensa teoretis ini dapat memperjelas problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Surakarta, dan darinya dapat ditarik rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan. Dua lensa teoretis itu juga saling berhubungan. Ketidakadilan yang substansial dalam masyarakat bisa menghasilkan kekerasan baik fisik, verbal, psikologis, maupun simbolik. Juga berbagai kekerasan yang terjadi mencerminkan ketidakadilan bagi anak berkebutuhan khusus. Meski demikian, teori keadilan Rawlsian yang memfokuskan diri pada aspek distribusi barang-barang material dan fasilitas publik mesti dilengkapi dengan teori kekerasan simbolik yang mampu melihat aspek non-distributif tetapi tak kasat mata dalam problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus.

Diinspirasi oleh teori kontrak sosial yang diwariskan oleh Locke, Hobbes, Rousseau dan Kant, Rawls berpandangan bahwa dalam konteks masalah keadilan, orang akan mengambil keputusan di bawah cadar ketidaktahuan (*the veil of ignorance*). Maksudnya, setiap orang tidak mengetahui posisi sosial dan taraf hidupnya di masa depan, jenis kelamin, identitas asalnya, kepentingan, sikap, talenta, bakat, dan lain-lain. Sederhananya, setiap orang sejak dilahirkan tidak bisa memperkirakan apakah dia beruntung terus dalam hidupnya di masa mendatang. Pilihan yang harus dijatuhkan terhadap aturan atau norma supaya mendapatkan

keadilan adalah memilih sistem norma yang paling menguntungkan dalam kondisi paling sulit (O.G. Madung, 2013:162).

Berdasarkan syarat di atas, maka pertama-tama Rawls membedakan arti keadilan sebagai *fair* dan *just*. Baik kata *fair* maupun *just*, keduanya sama-sama berarti adil. Tetapi keduanya berbeda secara mendasar. *Fair* merupakan keadilan prosedural, sedangkan *just* merupakan keadilan substansial. Contoh, dalam sebuah undian di sebuah Bank misalnya, undian bisa saja dibuat sangat *fair*, sehingga bisa saja semuanya jatuh ke tangan orang kaya. Sementara orang miskin tidak mendapatkan apa-apa. Secara substansial, itu dapat dikatakan sebagai tidak adil (*unjust*). Tetapi secara prosedural, itu tidak terjadi ketidakadilan (O.G.Madung,2013:162)

Rawls (dalam O.G. Madung, 2013:163) kemudian membahas prinsip keadilan menjadi dua bagian: *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas untuk semua orang. Di sini Rawls menganut egalitarianisme. Kebebasan-kebebasan seperti hak berpendapat, hak untuk mengikuti hati nurani, hak berkumpul dan sebagainya harus tersedia dengan cara yang sama untuk setiap orang. Masyarakat tidak diatur dengan adil kalau hanya satu kelompok boleh mengemukakan pendapatnya atau semua warga negara dipaksakan untuk memeluk satu agama. Kebebasan-kebebasan dasar itu harus seluas mungkin, tetapi ada batasnya juga. Batas bagi kebebasan satu orang adalah kebebasan dari semua orang lain. Jika saya begitu bebas, sehingga orang lain tidak bebas lagi, itu sama sekali tidak adil. Dengan kata lain, ini merupakan prinsip kebebasan (*liberty principle*) yang berada di prioritas utama dalam skema keadilan Rawlsian.

Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga: a) Menguntungkan terutama orang-orang yang kurang atau tidak beruntung, dan serentak juga; b) melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang *fair*. Prinsip 2 bagian a disebut prinsip perbedaan (*difference principle*). Supaya masyarakat diatur dengan adil, tidak perlu semua orang mendapatkan hal-hal yang sama. Di sini Rawls menolak egalitarianisme radikal. Boleh saja ada perbedaan dalam apa yang dibagi dalam masyarakat. Tetapi perbedaan itu harus sedemikian rupa sehingga

harus menguntungkan mereka yang kurang atau bahkan tidak beruntung. Misalnya, boleh saja dianggap adil jika negara memberikan bantuan beasiswa atau bantuan sosial kepada orang miskin atau memberi tunjangan kepada janda dan yatim piatu, sedangkan kepada orang lain yang cukup mampu tidak diberikan apa-apa. Prinsip ini meletakkan landasan etis bagi *welfare state* modern. Prinsip perbedaan merupakan perwujudan prinsip keadilan substansial.

Prinsip 2 bagian b disebut prinsip persamaan peluang yang fair. Adanya jabatan atau posisi penting mengakibatkan juga ketidaksamaan dalam masyarakat. Sudah sejak dahulu kala jabatan-jabatan tinggi sangat diinginkan orang bersama fasilitas dan privilese yang melekat padanya. Hal ini tidak boleh dianggap kurang adil, asalkan jabatan dan posisi itu pada prinsipnya terbuka untuk semua orang. Dengan kata lain, ini merupakan prinsip keadilan prosedural.

Dalam skala prioritas, prinsip pertama yaitu kebebasan-kebebasan dasar (*liberty principle*) yang sedapat mungkin sama harus diberi prioritas mutlak. Prinsip ini tidak pernah boleh dikalahkan oleh prinsip yang lain. Kebebasan-kebebasan dasar seperti hak asasi manusia misalnya tidak boleh dikalahkan oleh prinsip yang lain. Setelah itu barulah prinsip persamaan peluang yang fair, dan terakhir, adalah prinsip perbedaan.

Terhadap problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Surakarta, negara dan masyarakat secara mendasar memang sudah mempunyai kesadaran untuk mengutamakan kebebasan-kebebasan dasar yang seluas mungkin bagi setiap orang, apalagi warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus. Memakai skema prinsip keadilan Rawlsian, negara sudah memenuhi prinsip kebebasan (*liberty principle*), termasuk kebebasan mengakses pendidikan bagi semua warganya. Ini misalnya dapat dilihat pada penyediaan akses dasar yang sama seperti pendidikan. Negara menyediakan sekolah luar biasa bagi anak berkebutuhan khusus di beberapa kecamatan. Meski demikian, ketidakadilan substansial tetap terjadi terhadap anak berkebutuhan khusus. Hal ini misalnya dapat dilihat dari minimnya jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusif. Kompetensi guru pengajar seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan

khusus karena guru-guru tersebut merupakan guru yang datang dari bukan pendidikan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Seturut teori keadilan Rawlsian, ini melanggar prinsip perbedaan yang menekankan keadilan substansial.

Kurangnya guru pendamping khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus misalnya dapat ditemukan di Yayasan Al-Firdaus, sebuah lembaga persekolahan swasta Islam di Surakarta. Yayasan ini memiliki siswa yang berjumlah 735 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 107 ABK yang dilayani oleh 46 GPK (Guru Pendamping Khusus). Di level TK ada 11 ABK dengan 0 GPK, di level SD ada 53 ABK dengan 44 GPK, di Sekolah Menengah ada 43 ABK dengan 25 GPK. Kekurangan guru pendamping khusus ini berimplikasi pada tidak maksimalnya pelayanan kepada para siswa. Untuk merekrut guru pendamping khusus ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi, baik di sekolah umum (negeri) milik pemerintah maupun sekolah swasta, pemenuhan Guru Pendamping Khusus bagi para anak berkebutuhan khusus belum terpenuhi. Hal ini jelas membuat proses pembelajaran menjadi tidak maksimal. Idealnya, satu anak berkebutuhan khusus dilayani oleh satu guru pendamping khusus.

Ketidakadilan substansial terhadap anak berkebutuhan khusus juga dapat ditemukan pada kasus anak di kecamatan Pasar Kliwon yang berlatar belakang keluarga kurang mampu. Karena keadaan keluarganya yang kurang beruntung dalam hal sosial ekonomi, maka anak tersebut pun setiap hari secara rutin keluar dari rumah untuk meminta-minta makanan dari warung ke warung. Tentu saja hal ini sangat menyedihkan dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi demikian: "*fakir miskin dan anak-anak terlantar wajib mendapatkan pemeliharaan dari negara.*" Dalam perspektif teori keadilan Rawlsian, pengabaian negara terhadap anak berkebutuhan khusus ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan substansial, dimana terjadi pelanggaran terhadap prinsip perbedaan. Negara seharusnya membantu ekonomi keluarga dari si ABK tersebut sebagai bagian dari kelompok warga yang paling tidak beruntung, sehingga ada keadilan baginya dan kemudahan akses untuk mengikuti pendidikan seperti halnya anak-anak yang lainnya.

Kekerasan Simbolik dalam problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus

Masalah marginalisasi terhadap anak berkebutuhan khusus di Surakarta tidak hanya berkaitan dengan ketidakadilan substansial, tetapi juga kekerasan simbolik. Kelemahan teori keadilan Rawlsian adalah teori tersebut hanya memandang aspek distribusi material (barang-barang dan fasilitas) bagi publik. Teori itu tidak mampu melihat problem marginalisasi pada aspek yang sangat halus dan tidak kasat mata tetapi efeknya luar biasa yaitu kekerasan simbolik. Maka, uraian ini dilanjutkan dengan teori kekerasan simbolik dan paparan kasus sebagai data yang mendukungnya terkait marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Surakarta.

Teori kekerasan simbolik dirumuskan oleh Pierre Bourdieu, seorang sosiolog kenamaan dari Prancis. Teorinya menekankan bahwa selalu ada dominasi dalam masyarakat, terutama dominasi antar kelas-kelas sosial. Bordieu mengoreksi tradisi Marxian bahwa dominasi kelas tidak hanya pada dimensi ekonomi tetapi juga dominasi budaya, politik, gender, seni dan sebagainya dalam berbagai ranah (Krisdinanto, 2014). Dominasi terlihat pada bagaimana kelas intelektual dan penguasa melestarikan keistimewaan sosial mereka lintas generasi. Pelestarian ini tetap terlihat meskipun kelas penguasa menciptakan mitos bahwa masyarakat biasa tetap memiliki kesamaan peluang dan mobilitas sosial yang tinggi melalui pendidikan formal. Namun, pada praktiknya tetap ada persaingan, dan persaingan itu tentunya berkaitan dengan pihak mana yang unggul, dominan dan menang (Arismunandar, 2009). Konsep-konsep kunci dari Bordieu seperti habitus, modal dan ranah/arena kemudian digunakan untuk menganalisa dominasi di berbagai ranah.

Habitus merupakan merupakan disposisi atau kecenderungan bertindak yang tertanam kuat sebagai hasil dari proses pembentukan historis yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara obyektif. Habitus merupakan produk sejarah yang terjadi ketika manusia itu lahir lalu berinteraksi dengan masyarakat. Disposisi ini mengandung beberapa skema seperti pikiran, pemahaman, persepsi dan tindakan yang berlangsung lama. Sebagai hasil pembelajaran yang begitu halus dan tidak disadari membuat

habitus tampil menjadi sistem yang sudah tidak dipertanyakan lagi. Habitus nantinya akan menjadi sebuah rangkaian kecenderungan yang mengarahkan individu untuk menghadapi kehidupan sosial (Pitaloka 2021; Siregar 2016). Modal merupakan sesuatu yang diakumulasi oleh individu, menempatkan individu pada kelas-kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Ada empat macam modal yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Modal dapat dipertukarkan satu sama lain, dapat diakumulasi dari modal yang lain. Habitus berperan sebagian untuk menggandakan modal, terutama modal simbolik. Akumulasi modal tidak otomatis menentukan dominasi dalam sebuah pertarungan. Individu harus memahami modal apa yang efektif serta strategi penempatan modal dalam suatu arena. Semua modal ini digunakan untuk merebut dan mempertahankan perbedaan dan dominasi.

Modal ekonomi merupakan akumulasi kekayaan atau uang yang dimiliki seseorang. Modal ekonomi memberikan keuntungan pada pemiliknya dalam menentukan posisi di lingkungan sosial. Modal sosial berupa jaringan sosial atau kenalan yang dimiliki seseorang dengan pihak lain yang juga berperan dalam memberikan kedudukan sosial. Jaringan adalah hubungan saling kenal dan terikat. Modal budaya merupakan kemampuan individu dalam menentukan kedudukan sosial termasuk wawasan, cara berpikir, sikap yang membentuk sebuah identitas dan menyatu dengan habitus. Sedangkan modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan yang dimiliki seseorang. Modal simbolik biasanya di masyarakat dikenal sebagai modal yang sah dan natural seperti tempat tinggal, hobi, tempat makan, citra, gelar dan lain-lain. Menurut Bourdieu, modal simbolik merupakan sumber kekuasaan yang krusial dalam kekerasan simbolik (Haryatmoko, 2010).

Arena/ranah merupakan sebuah ruang dimana hubungan-hubungan kelas sosial terjadi; tempat pertarungan, kompetisi dan konflik terjadi secara terus-menerus dalam banyak bentuk, termasuk dalam bentuk simbolik. Kompetisi yang ada dalam sebuah arena adalah pertarungan antar agen sosial yang saling mempertahankan posisinya yang terkait dengan modal dan habitus (Alfian 2023). Pertarungan yang dimaksud bukanlah pertarungan secara fisik, melainkan simbolik. Mereka saling bersaing untuk

mendapatkan modal lebih banyak, sehingga terjadi perbedaan antara satu agen dengan agen yang lain. Perbedaan itu memberi struktur hierarki sosial dan mendapat legitimasi seakan-akan menjadi suatu proses yang alamiah. Selain akumulasi modal, strategi menempatkan modal juga menjadi penentu kemenangan dalam sebuah pertarungan di arena.

Dominasi atau kekuasaan individu terhadap individu yang lain sangat bergantung pada habitus, akumulasi modal dan strategi penempatan modal dalam arena kontestasi. Kekuasaan akan melahirkan ketidaksetaraan, dominasi kelompok penguasa terhadap kelompok yang dikuasai. Bagi Bordieu, kekuasaan selalu berkaitan dengan kekerasan yang tercipta. Bordieu mempopulerkan kekerasan simbolik sebagai kontribusinya dalam khasanah ilmu sosial (Alfian, 2023). Kekerasan simbolik diartikan sebagai kekerasan yang berlangsung dengan persetujuan tersirat dari korbannya sejauh mereka tidak sadar melakukan atau menderitanya (Haryatmoko, 2007). Kekuasaan simbolik bisa memaksakan pemaknaan secara sah dengan menyembunyikan hubungan kekuatan yang merupakan dasar kekuasaannya. Melalui mekanisme ini, pihak yang didominasi tidak menyadari adanya pemaksaan yang menumbuhkan perasaan bahwa itu sebuah kewajaran yang dapat diterima.

Kekerasan simbolik ini beroperasi melalui bahasa atau wacana. Kekerasan itu disebut simbolik karena dampaknya tidak terlihat seperti dampak kekerasan fisik atau kekerasan verbal maupun psikologis. Tidak terlihat adanya luka, akibat traumatik, tidak ada ketakutan atau kegelisahan, bahkan korban tidak merasa telah didominasi atau dimanipulasi. Kekerasan simbolik terjadi karena pengakuan dan ketidaktahuan dari yang didominasi. Hanya saja prinsip simbolis diketahui dan diterima, baik oleh yang menguasai maupun yang dikuasai. Prinsip simbolis ini berupa bahasa, cara berpikir, cara kerja dan cara bertindak sehingga pada akhirnya akan menentukan pula cara bertindak individu (Haryatmoko, 2010: 127-128).

Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kekerasan simbolik yang terjadi dalam problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Surakarta? Sebagian besar cerita yang dikumpulkan dari 3 kecamatan di Surakarta sebelumnya mengungkapkan kekerasan fisik, verbal dan psikologis terhadap anak-anak berkebutuhan khusus baik di lingkungan pendidikan

maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Pem-bully-an, perundungan, sikap dan tatapan sinis serta perilaku kasar dari teman-teman sebaya, guru, tetangga dan masyarakat yang kurang paham terhadap kondisi mereka membuktikan hal tersebut.

Kekerasan simbolik yang terjadi pada anak-anak berkebutuhan khusus di Surakarta dapat diidentifikasi ketika penulis terlibat dalam konsultasi orang tua anak berkebutuhan khusus. Itu berarti, arena atau ranah kekerasan simbolik itu terjadi dalam keluarga. Dua kasus berikut menggambarkan hal itu: Kasus *pertama*, seorang ibu muda yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan belum memiliki pengalaman parenting menceritakan keadaan anaknya. Ibu dari anak berkebutuhan khusus tersebut menjelaskan kondisi anak yang mengalami gangguan emosional. Walaupun tergolong ABK kategori ringan, Ibu ABK ini menghadapi kondisi keluarga yang agak rumit dimana suaminya bekerja di luar kota. Ketika ayah ABK libur kerja pulang ke rumah, dia cenderung memberikan hadiah tanpa komunikasi dengan ibunya. Kondisi ini diperburuk ketika anak bertemu ayahnya, permintaan apapun dari anaknya selalu dituruti ayahnya. Dampaknya, anak ABK ini lebih dekat kepada ayahnya karena merasa ayah sebagai sosok yang menuruti kemauannya. Ketika ayah ABK ini bekerja di luar kota, ibu merasa kesusahan untuk mendidik anak karena sering memberontak dan tidak menghiraukan nasehat ibunya. Ketimpangan ini terjadi karena suami tidak melibatkan istri dengan memberikan *reward* kepada anak.

Dalam kasus ini, dominasi tercipta dari ayah ke anaknya melalui pemberian hadiah. Bagi si ayah, pemberian hadiah dan menuruti kemauan anak yang terus-menerus merupakan ungkapan kasih sayang yang wajar kepada anaknya. Meski demikian, hal tersebut menciptakan ketergantungan kepada anak dan menciptakan konflik antara istri dengan anaknya. Dalam perspektif kekerasan simbolik Bordieu, pemberian hadiah dan menuruti kemauan anak yang terus-menerus menjadi kekerasan simbolik. Lewat pemberian hadiah, si anak tidak merasa didominasi oleh si ayah, sama halnya dengan si istri. Istri menjadi bergantung kepada suami yang dalam ranah keluarga lebih memiliki banyak modal, terutama modal ekonomi. Si istri pun menganggap pemberian hadiah dan selalu menuruti keinginan si anak atas nama rasa kasih sayang sebagai suatu hal yang wajar. Dominasi

dari si ayah terhadap istri misalnya tampak ketika ia memberikan hadiah kepada anak tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan istrinya. Sadar atau tidak sadar, si ayah merasa bahwa ia adalah penopang utama ekonomi keluarga, dengan kata lain dia memiliki modal ekonomi yang lebih kuat daripada istrinya dalam kontestasi modal di keluarga. Si istri tidak bisa berbuat banyak dan menganggap itu sebagai hal yang wajar. Sehingga ia kesulitan ketika anaknya sering memberontak dan tidak menghiraukan nasihatnya saat ayahnya berada di luar kota. Si anak pun merasa peran ayah yang penting bagi hidupnya, dan baginya itu merupakan suatu hal yang wajar, bisa diterima berdasarkan kontribusi ayahnya dalam memberikan hadiah dan menuruti kemauannya.

Cerita tersebut menggambarkan dominasi seorang ayah dalam keluarga. Dominasi si ayah merupakan bentuk dominasi khas masyarakat patriarkis sebagai habitusnya. Habitus masyarakat yang patriarkis menempatkan pihak laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam keluarga. Segala keputusan baik dari hal yang paling penting maupun yang remeh-temeh ada di tangan laki-laki atau dalam hal ini ayah. Habitus membentuk disposisi kecenderungan bertindak dari seorang agen atau aktor dalam suatu ranah. Habitus patriarkis dalam arena keluarga secara sadar atau tanpa sadar mengarahkan tindakan seorang ayah yang tidak berkonsultasi dengan istrinya terlebih dahulu untuk memberikan hadiah bagi anak, meski atas nama rasa sayang sekalipun.

Habitus masyarakat patriarkis sudah sejak lama berkembang dalam masyarakat tradisional, dan tetap berlanjut dalam masyarakat modern. Pada masyarakat modern di mana perubahan sosial menjadi luar biasa, tempat kerja seseorang bisa menjadi sangat fleksibel. Pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat agraris, tempat kerja biasanya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setiap hari anggota keluarga bisa berkumpul secara penuh, tanpa terpisah secara ruang dan jarak. Misalnya, keluarga petani di desa. Hal ini tentu saja berbeda dalam keluarga modern yang banyak di perkotaan. Seorang suami bisa saja tinggal berjauhan untuk waktu tertentu dari istri dan anaknya karena alasan pekerjaan. Konsekuensinya perhatian kepada anaknya tidak bisa secara penuh, sehingga momen liburan bersama keluarga merupakan momen yang sangat berharga untuk memperhatikan keluarga,

termasuk menuruti apapun kemauan anak. Atas nama perhatian kepada keluarga, terlebih rasa sayang kepada anak, si ayah secara tanpa sadar kemudian menegaskan dominasinya dalam keluarga dengan menuruti apapun kemauan si anak. Dapat dilihat bahwa perubahan model kehidupan kerja pada masyarakat modern di perkotaan saat ini semakin memperkuat habitus patriarkis dalam keluarga.

Ketimpangan antara peran si ayah dan si ibu dalam pendidikan anak membentuk habitus bagi si anak dalam keluarga. Si anak tentu akan lebih menghargai peran ayah daripada peran ibu dalam keluarga. Dengan itu habitus patriarkis juga ditanamkan dan diinternalisasi oleh si anak, yang tentu saja menentukan disposisi kecenderungan tindakan sosialnya di masa depan. Dalam relasi sosial, kecenderungan untuk bergaul si anak ditentukan oleh seberapa besar dan sering pemberian orang lain terhadapnya. Si anak cenderung untuk menganggap orang yang bernilai baginya adalah orang yang memberikannya banyak hadiah dan mengikuti kemauannya. Dengan kata lain, nilai materialistik menjadi ukuran penting dalam pergaulan dengan orang lain. Hemat penulis, hal ini juga merupakan cerminan masyarakat Surakarta, bahkan Jawa umumnya. Ini terlihat bila seseorang atau suatu keluarga berniat mengunjungi orang atau keluarga yang lain untuk suatu urusan, mereka harus membawa semacam buah tangan atau oleh-oleh. Atau bila bepergian jauh, seseorang dalam suatu keluarga ketika pulang biasanya membawa oleh-oleh yang dinanti-nantikan oleh para anggota keluarga. Jika itu tidak dilakukan, maka muncul penilaian yang kurang baik atau kekecewaan terhadap anggota keluarga yang diharapkan membawa oleh-oleh itu.

Dari aspek modal, kasus di atas jelas menunjukkan dominasi seorang ayah lewat kepemilikan modal yang dimiliki, dalam hal ini modal ekonomi. Ayah merupakan tulang punggung ekonomi dalam keluarga, sementara si ibu merupakan ibu rumah tangga. Kondisi seperti ini tentu tidak menguntungkan si ibu karena masyarakat seringkali menganggap jauh lebih penting pihak yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, daripada ibu rumah tangga yang lebih banyak di rumah untuk merawat anak dan mengurus rumah. Tentu saja ini merupakan sebuah ketidakadilan gender yang luar biasa, meskipun masyarakat sering menganggap hal ini masih

sebagai sesuatu yang wajar. Ini juga merupakan kekerasan simbolik terhadap pihak ibu atau perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dalam keluarga. Hal ini pun tidak terlepas dari habitus masyarakat yang masih patriarkis meskipun sudah memasuki model kehidupan yang modern.

Kekerasan simbolik tampak ketika dominasi ayah melalui pemberian hadiah kepada anak memungkinkan anak menjadi pencipta konflik antara ayah dan ibunya. Hubungan antara ayah, ibu dan anak secara sosiologis merupakan hubungan tigaan (*triadic*), yang melibatkan tiga anggota atau tiga pihak. Ini tentu berbeda dengan hubungan duaan (*dyadic*) yang melibatkan hanya dua orang atau dua kelompok, seperti hubungan suami-istri (ayah-ibu) dalam keluarga. Dalam hubungan tigaan di keluarga, anak bisa memainkan peran sebagai sumber atau pencipta konflik. Anak bisa menjadi pengadu domba (*divider and conqueror*) antara ayah dan ibu. Anak bisa berpihak pada salah satu pihak, entah ayah ataupun ibu berdasarkan alasan tertentu. Kasus di atas jelas menunjukkan bahwa anak lebih berpihak kepada ayah karena ayah selalu memberikan hadiah kepada anaknya saat dia pulang ke rumah waktu liburan. Di sisi lain, si anak mengembangkan konflik terhadap ibunya ketika menentang didikan ibunya saat ayah tidak berada di rumah. Konflik tercipta karena dominasi ayah yang mencerminkan habitus patriarkis dan modal ekonomi terhadap ibu meskipun keluarga itu adalah contoh dari keluarga modern. Anak memainkan peran sebagai pihak yang lebih berpihak pada ayah dan cenderung memusuhi ibunya. Pada titik inilah, konflik menciptakan kekerasan simbolik dalam keluarga. Ayah melakukan kekerasan simbolik terhadap ibu lewat dominasi modal ekonomi dan habitus patriarkisnya. Jadi, kekerasan simbolik ayah terhadap anak melalui pemberian hadiah menciptakan konflik kepada ibu. Sebaliknya pun sama, konflik antara ayah dan ibu menciptakan kekerasan simbolik ayah kepada ibu. Baik anak maupun ibu menjadi korban kekerasan simbolik sang ayah.

Kasus *kedua* yang lebih kompleks adalah anak berkebutuhan khusus dengan kategori ringan yaitu gangguan emosi perilaku. Menurut hasil asesmen, anak berkebutuhan khusus tersebut memiliki sikap manipulatif dan suka memukul temannya. ABK ini tinggal bersama kakek dan neneknya. Permasalahan yang dihadapi justru bermula dari masalah

keluarga yang cukup berat. Permasalahan itu membuat orang tua ABK masih belum mampu menerima kondisi dan keberadaan anaknya. Pada situasi lain, anak sering mendapatkan pelampiasan emosi orang tua ABK. Orang tua asuh ABK, kakek dan neneknya mendidiknya terlalu kaku sehingga menimbulkan tekanan psikologis pada ABK. Orang tua asuh sering memberikan hukuman kepada ABK jika melakukan kesalahan.

Kasus ini memang cukup berat karena problem dasarnya terletak pada seorang ibu yang belum mampu menerima kondisi dan keberadaan anaknya. Si anak merupakan hasil dari hubungan yang tidak dikehendaki oleh ibunya dengan calon ayahnya. Si ibu terlibat dalam pergaulan bebas di Jakarta, bertemu seorang lelaki yang tidak diharapkan oleh si ibu. Si ibu sendiri pada masa lalunya merupakan anak yang datang dari keluarga yang bercerai. Si ibu kemudian diasuh oleh sebuah keluarga yang kelak menjadi orang tua asuhnya, sekaligus menjadi kakek dan nenek bagi anaknya. Bagaimanapun, penerimaan kondisi dan keberadaan si anak sangat menentukan hidup anak itu sendiri sepanjang hidupnya. Penolakan terhadap kondisi dan keberadaan anak mengakibatkan anak itu tidak bisa menerima dirinya sendiri dan orang lain. Hemat penulis, tidak mengakui keberadaan anak dan kondisinya merupakan suatu jenis kekerasan eksistensial, sesuatu yang tidak ada dalam perspektif Bourdieu. Latar belakang seperti ini tentu sangat berpengaruh dalam proses habituasi si anak di keluarga.

Kekerasan simbolik dapat ditemukan dalam kasus ini terutama pada model pendidikan yang terlalu kaku terhadap anak. Setiap kali anak melakukan kesalahan, selalu ada hukuman yang menyertainya. Di satu pihak, orang tua asuh dan kakek-nenek rupanya menganggap bahwa model pendidikan seperti itu sebagai suatu hal yang wajar saja. Di pihak lain, si anak beranggapan bahwa memang wajar kalau setiap kali dia melakukan kesalahan, dia pantas mendapatkan hukuman. Tentu saja, sudah bisa dibayangkan bahwa kebiasaan keluarga seperti itu akan membentuk habitus dalam diri si anak sebagai orang yang suka menghukum, tidak bisa mentoleransi kesalahan. Padahal kesalahan itu merupakan suatu hal yang manusiawi. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan tidak setiap kesalahan mesti mendapatkan hukuman. Tentu saja hukuman itu tergantung pada derajat kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya.

Tindakan orang tua asuh dan kake-neneknya yang suka menghukum seperti itu menggambarkan juga habitus keluarga tersebut yang cenderung kaku dan suka menghukum. Habitus keluarga yang kaku dan tidak bisa mentoleransi kesalahan berefek pada anak yang juga bersikap kaku dalam interaksi sosial. Hal ini tentu saja menyulitkan dirinya dalam kehidupannya ke depan, apalagi dia termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan yang terlalu kaku karena berlandaskan hukuman menciptakan kecenderungan kepada anak yang tidak mentoleransi kesalahan orang lain. Itu terlihat ketika anak tersebut memukul temannya yang dianggapnya bersalah. Problem tentu saja menjadi kompleks karena hal ini berkaitan dengan kekerasan eksistensial yang dialami si anak.

Si anak dititipkan pada kakek dan nenek juga menjelaskan dominasi karena perbedaan modal yang dimiliki, terutama modal ekonomi, modal sosial dan modal kultural. Kakek dan nenek anak tersebut merupakan keluarga yang mapan secara ekonomi, juga terpandang di masyarakat. Keluarga tersebut sanggup menguliahkan ibu dari si anak tersebut. Kakek dan nenek memiliki jaringan pertemanan yang luas, dimana mereka bisa mencarikan calon suami yang tepat bagi anaknya. Beberapa kali mereka menawarkan calon suami yang mapan secara ekonomi kepada ibu dari anak tersebut, tetapi selalu ditolaknya. Mereka juga merupakan keluarga Jawa yang ketat dalam hal sopan santun, layaknya keluarga Jawa umumnya. Selain itu, keluarga asuh merupakan keluarga yang sangat Islami, kental nuansa religiusnya. Ini tentu berbeda dengan si ibu yang sedang berkuliah di Semarang, secara ekonomi belum mampu untuk membangun keluarga yang baru. Kepemilikan modal ekonomi, sosial dan kultural yang dimiliki oleh orang tua asuh menegaskan dominasi mereka atas si ibu dan anaknya. Dengan dominasi modal yang didukung oleh habitus keluarga yang cenderung kaku dan berbasis hukuman dalam mendidik anak, maka tidaklah mengherankan bila orang tua asuh tersebut kemudian menerapkan model pendidikan yang kaku dan berbasis hukuman kepada ABK tersebut dalam keluarga mereka. Jadi, tindakan dan perilaku kekerasan yang muncul dan dilakukan oleh si ABK pada anak-anak yang lain merupakan akibat kekerasan simbolik dalam pendidikan yang ia terima di keluarganya dan kekerasan eksistensial yang dialaminya dalam hubungan dengan ibunya.

Keseluruhan cerita tentang marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Surakarta sesungguhnya menampakkan kekerasan simbolik terhadap mereka. Secara kasat mata, kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan fisik, verbal, emosional-psikologis. Tetapi pertanyaan yang tersisa adalah atas alasan apa para pelaku melakukan hal tersebut kepada mereka? Di sini, tampaknya para pelaku menganggap bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu merupakan kelompok sosial yang berbeda dan mengalami kekurangan. Faktor kekurangan dan keberbedaan baik dari segi mental maupun fisik menjadikan mereka sebagai pihak yang mudah dikorbankan dalam kehidupan sosial. Ketika lingkungan sosial memperlakukan mereka secara diskriminatif penuh kekerasan, masyarakat cenderung menganggap hal tersebut sebagai kewajaran. Di sisi lain, perlakuan tersebut dianggap wajar oleh korban karena kesadaran akan keterbatasan yang mereka alami membuat mereka tidak berdaya untuk melawan.

Mewajarkan perilaku kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus juga sangat jelas dalam kasus dimana anak berkebutuhan khusus itu dianggap sebagai anak yang kerasukan hantu. Oleh karena itu, anak tersebut harus dibawa ke orang pintar (dukun). Ia pun dijauhi, dipanggil dengan sebutan negatif dan orang tidak mau menyentuh mereka. Cerita ini sebenarnya menunjukkan masyarakat kita yang mewajarkan kekerasan, terutama bagi pihak-pihak yang mudah dikorbankan. Sebagai perbandingan (dalam Rene Girard, 1977: 29), pada masyarakat Yunani klasik, ketika seorang menggantung diri, tubuhnya dianggap *impure* (tidak murni/penuh dosa). Maka, pohon dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dimana ia berdiri dianggap *impure*. Wilayah yang *impure* itu seperti medan magnet yang memancarkan kekerasan. Semakin jauh sebuah tempat dari tubuh itu, *impuritas* semakin berkurang. Begitupun dengan orang yang melakukan pertumpahan darah. Orang takut berbicara atau menyentuh mereka karena takut ketularan kekerasan. Purifikasi dilakukan setelah mereka pergi. Hal ini juga sama pada beberapa masyarakat yang menganggap menderita penyakit menular seperti cacar. Penyakit tersebut dianggap mempunyai dewa. Orang yang menderita sakit tersebut mesti dipersembahkan kepada dewa itu. Itu berarti ia harus diasingkan dari komunitasnya dan berada di bawah pengawasan seorang imam yang telah ditugaskan untuk itu. Imam ini

mengambil bagian dalam kekuatan dewa itu dan kebal terhadap kekerasan/penyakit dari dewa itu.

Perbandingan seperti di atas adalah perbandingan dengan masyarakat-masyarakat manusia pada zaman primitif. Tetapi, lebih dari sekedar perbandingan, dari perspektif Bourdieu, begitu mudahnya para anak berkebutuhan khusus didiskriminasi dengan menganggap mereka sebagai dirasuki hantu dan karenanya harus dibawa ke dukun mengungkapkan habitus masyarakat kita yang mirip dengan dan kelanjutan dari masyarakat primitif. Tidaklah mengherankan jika habitus perdukunan merupakan warisan dari zaman primitif tersebut masih tersisa sampai sekarang. Sebagaimana diketahui, praktek perdukunan merupakan praktek yang biasa dilakukan di berbagai kelompok masyarakat di Indonesia termasuk di Surakarta, dan masyarakat menganggap wajar jika membawa anak ke dukun untuk pengobatannya. Peran si dukun serupa dengan peran si imam dalam masyarakat primitif tadi yaitu melakukan purifikasi; yang berarti menghilangkan kekerasan dari pelaku, korban dan masyarakat. Meski demikian, purifikasi itu tidak lain merupakan kekerasan simbolik. Si dukun berkuasa atas ABK dan masyarakat (termasuk orang tua ABK) karena modal simbolik yang dimilikinya. Habitus seperti itu akan semakin dipertahankan manakala ketidakadilan substansial tetap dibiarkan oleh negara dan masyarakat disertai dominasi modal ekonomi, sosial, kultural, simbolik baik antar anggota dalam keluarga, maupun antar aktor dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Surakarta terjadi baik di lingkungan pendidikan, maupun di lingkungan masyarakat, utamanya keluarga dan ketetangaan. Dari perspektif teori keadilan Rawlsian, marginalisasi terhadap anak berkebutuhan khusus itu merupakan wujud nyata ketidakadilan substansial terhadap mereka. Ini tampak pada lingkungan pendidikan terutama sekolah umum tidak mengutamakan fasilitas dan kenyamanan belajar bagi mereka. Di lingkungan sosial, masih muncul ketidakadilan substansial dimana negara kurang memperhatikan kondisi ekonomi dari anak berkebutuhan khusus yang berasal dari keluarga

miskin. Meski demikian, marginalisasi itu tidak hanya berkaitan dengan struktur distribusi material seperti akses dan fasilitas publik yang memadai bagi mereka, tetapi juga terkait dengan kekerasan simbolik yang mereka alami. Kekerasan simbolik agak berbeda dengan jenis kekerasan yang lain seperti fisik, verbal, psikologis, seksual, dan lain-lain. Semua yang disebutkan selain kekerasan simbolik itu jelas nyata efeknya, akan tetapi kekerasan simbolik membuat korban tidak merasakannya sebagai sebuah kekerasan, bahkan menganggapnya wajar. Dua kasus yang diajukan di bagian pembahasan mencerminkan terjadinya kekerasan simbolik terhadap anak berkebutuhan khusus, kekerasan yang bahkan dilakukan oleh orang tua kandung ataupun orang tua asuhnya. Kasus pertama tentang kasus pemberian hadiah oleh ayah kepada anaknya yang memicu konflik dalam keluarga. Dominasi ayah karena habitus patriarkis dan modal ekonomi yang dimiliki menjadikan ibu dan anak sebagai korban kekerasan simbolik. Kasus kedua bercerita tentang habitus keluarga yang mendidik anak berbasis hukuman disertai dominasi modal ekonomi, sosial dan kultural orang tua asuh bagi si ibu menjadikan anak sebagai korban kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik juga terjadi dalam kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus dirasuki hantu, dan karena itu harus disembukan oleh dukun. Ini terjadi karena masyarakat yang masih mewarisi habitus masyarakat primitif, meskipun serentak menjadi bagian dari masyarakat modern perkotaan.

Untuk mengatasi ketidakadilan substansial terhadap para anak berkebutuhan khusus, penulis menganjurkan agar negara memperhatikan dan mengutamakan fasilitas publik, apalagi pendidikan untuk para anak berkebutuhan khusus. Selain itu, untuk mengatasi kekerasan simbolik, masyarakat perlu untuk menyadari dan meninggalkan berbagai habitus yang cenderung mengarahkan tindakan setiap aktor melakukan kekerasan simbolik kepada anak berkebutuhan khusus seperti habitus patriarkis dan habitus pendidikan berbasis hukuman dalam keluarga, juga habitus perdukunan yang merupakan sisa-sisa dari masyarakat primitif dalam masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. (2023). *Kekerasan Simbolik dalam Wacana Keagamaan di Indonesia*. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 18(1), 25-50.
- Alakhunova, N., et al. (2015). *Defining Marginalization: An Assessment Tool*. Washington: The George Washington University, The Elliot School of International Affairs & WFTO-Asia.
- Arismunandar, S. (2009). *Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doxa dan Kekerasan Simbolik*. Program S3 Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Berlinda, L. M., & Naryoso, A. (2018). *Kompetensi Komunikasi Guru Pendamping Khusus di Sekolah Inklusi*. Interaksi Online, 6(4), 411-422.
- Chand, R., et al. (2017). *Societies Social Inequalities and Marginalization Marginal Regions in the 21st Century*. Slovenia: Springer International Publishing.
- Dermawan, O. (2013). *Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB*. Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi, 7(2), 886-897.
- Dwizatmiko. (2010). *Kuasa Simbolik Menurut Pierre Bourdieu; Telaah Filosofis*. Skripsi. Universitas Indonesia: Depok.
- Girard, Rene. (1977). *Violence and The Sacred*. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.
- Haryatmoko, J. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Haslinda, H. (2019). *Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Pariwisata*. AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 10(1), 92-98.
- Indriyani, R. (2021). *Marginalisasi Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Potensia, 10(1), 1-11.
- Krisdinanto, N. (2014). *Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai*. KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 189-206.
- Layyinah, A., et al. (2023). *Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus*. Universitas Negeri Surabaya.
- Madung, Otto Gusti. (2013). *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Nida, F. L. K. (2018). *Membangun Konsep Diri Bagi Anak*

Berkebutuhan Khusus.

ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, 2(1), 45-64.

- Nock, M., Kazdin, A., Hiripi, È., & Kessler, R. (2007). *Lifetime prevalence, correlates, and persistence of oppositional defiant disorder: results from the national comorbidity survey replication*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 48(7), 703-713.
- Pitaloka, E. P. T. R., & Putri, A. K. (2021). *Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)*. *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 90-114.
- Prasetyo, A . (2022). *The Marginalization of Children with Disabilities in Indonesia: A Case Study*. *International Journal of Inclusive Education*, 26(1), 33-46.
- Rakhmayanti, F. & Wiyatmi (2019). *Marginalisasi Perempuan Dalam Novel-Novel Karya Suparto Brata*. Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Raho, Bernard. (2008). *Sosiologi, Sebuah Pengantar*. Maumere: Penerbit Ledalero, cet. ke-2.
- Rohmah, I. (2022). *Marginalisasi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi*. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 19(2), 111-125.
- Syaadah, R., Ary, M. H., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). *Pendidikan formal, Pendidikan non formal Dan Pendidikan informal*. *PEMA (Jurnal pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 125–131.
- Siregar, M. (2016). *Teori “Gado-gado” Pierre-Felix Bourdieu*. *An Image Jurnal Studi Kultural*, 1, 84-87.
- Zara, R. H. & Jatinangsih, O. (2022). *Praktik Pendidikan Karakter Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SD Muhammadiyah Kota Madiun*. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(5), 713-727.